LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2022

DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ini dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian laporan ini masih banyak terdapat kekurangan oleh karena itu kritik dan saran sangat kami perlukan untuk penyempurnaan laporan yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Samarinda, Februari 2023

Kepala,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS SOSIAL

Dra. Hj. Norhayati US, M.Si.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19660531 198609 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu permasalahan terjadinya disfungsi sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah terjadinya disfungsi sosial, baik akibat kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasusilaan, keterbelakangan, keterasingan, korban tindak kekerasan maupun akibat korban bencana. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebagai SKPD yang menangani permasalahan tersebut diatas sangat berkomitmen untuk memulihkan dan mengembangkan keberfungsian sosial masyarakat yang hasil-hasil pelaksanaan kegiatannya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2022 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur ini disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Palaporan Kinerja Instasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Petunjuk teknis ini memberikan tuntunan kepada instansi pemerintah untuk menyiapkan Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah sebagai bagian integral dari sistem akuntabilitas yang utuh.

Adapun kondisi Pembangunan Kesejahteraan Sosial saat ini populasi Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) sebesar 249.893 jiwa. Pencapaian penanganan PMKS dengan Program dan Kegiatan yang ada telah mampu menurunkan 1,69% PMKS dengan kondisi tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur sebesar kurang lebih 5 - 6%.

Kondisi ini terlihat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang sebelumnya pada posisi B meningkat menjadi BB.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Sumber Daya Aparatur	7
E. Aspek Strategis Organisasi	8
F. Isu-isu Strategis	9
G. Sarana dan Prasaran Kerja Perangkat Daerah	10
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	11
1. Visi	11
2. Misi	12
3. Tujuan	12
4. Sasaran	13
5. Indikator Kinerja Sasaran	13
6. Target Tahunan	13
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	19
C. PERNAJIAN KINERJA TAHUN 2022	19

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi dan Implementasi 20

B. Pengukuran Capaian Kinerja 20

C. Analisis Capaian Kinerja .....…… 21

D. Realisasi Anggaran 27

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 33

B. Saran 33

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	Tabel	Halaman
1.	Tabel 1. Sumber Daya Aparatur (SDA) ..……	8
2.	Tabel 2. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Prov. Kaltim ……	10
3.	Tabel 3. Target Tahunan ..…….……	14
4.	Tabel 4. Program dan Kegiatan ..……..	14
5.	Tabel 5. Penetapan Indikator Kinerja Utama ..……	19
6.	Tabel 6. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Prov Kaltimur	19
7.	Tabel 7. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ……..	20
8.	Tabel 8. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Prov. Kaltim Tahun 2022 Per Triwulan	21
9.	Tabel 9. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	21
10.	Tabel 10. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	21
11.	Tabel 11 Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Prov Kaltim Tahun 2022 dengan Renstra.....	22
12.	Tabel 12. Analisis Efisiensi Sumber Daya Dinas Sosial	26
13.	Tabel 13. Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja	27
14.	Tabel 14. Realisasi Anggaran APBD	27

DAFTAR GRAFIK

Grafik Halaman

1. Grafik 1. Perkembangan dan Jumlah Anggaran APBD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur periode 2018 –2022 ….. 32

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di Bidang Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kaliamantan Timur.

B. Tugas dan Fungsi

1. Tugas.

   Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Sosial berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

2. Fungsi.

   Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Sosial Prov Kaltim mempunyai fungsi sebagai berikut :

   a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial Sesuai dengan Rencana Strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
   b. Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Sosial;
   c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Sosial;
   d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Pemberdayaan Sosial;
   e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial;
   f. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Bantuan Dan Jaminan Sosial;
   g. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
   h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
   i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
   j. Pelaksana Tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

C. Struktur Organisasi

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016, mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas, membawahi :

1. Sekretariat.;
2. Bidang Pemberdayaan Sosial;
3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
4. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
5. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretariat.

Sekretariat membawahi Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Perencanaan Program, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan;
b. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
c. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.

2. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi Seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

a. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pemberdayaan komunitas adat terpencil, pendataan komunitas adat terpencil serta melakukan KAT;

b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan, Pengumpul & Pengolah Sumber Dana Sosial, mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian, peran keluarga dan penyuluhan sosial;

c. Seksi Pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, peran keluarga dan penyuluhan sosial.

3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi Seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

a. Seksi Rehabilitasi Disabilitas, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi kegiatan pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas;

b. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lansia, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kesejahteraan anak terlantar, anak jalanan, anak nakal serta lanjut usia terlantar;

b. Seksi Rehabilitasi Tuna Susila, Napza, Korban Tindak Kekerasan serta Korban Perdagangan Orang, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rehabilitasi tuna sosial, korban napza dan korban tindak kekerasan serta korban perdagangan orang / *human trafficking.*

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi Seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

a. Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, melakukan pertolongan dan penyelamatan korban shelter logistic serta form keserasian sosial dengan kearifan local;

b. Seksi Penanganan Korban Bencana Alam, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, melakukan pertolongan dan penyelamatan korban shelter logistik, evaluasi dan pendampingan psikolososial;
c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pendayagunaan sumber dana sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) dan jaminan kesejahteraan sosial.

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi Seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.

a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian dan pemberian batuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada fakir miskin di perkotaan;
b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian dan pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada fakir miskin di Perdesaan;
c. Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Perbatasan Terpencil dan Pulau Terluar, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian dan pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada fakir miskin di daerah perbatasan terpencil dan pulau terluar.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebanyak 5 unit yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD tersebut terdiri dari :

a. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan (PSAAH) Samarinda

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Kesejahteraan Sosial.

Fungsi UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan (PSAAH) adalah penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial anak terlantar.

Daya tampung 80 (Delapan Puluh) anak dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- Kepala UPTD, dengan dibantu :
- Bagian Tata Usaha;
- Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
- Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

b. UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma (PSPAD) Samarinda.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang kesejahteraan sosial anak dalam pola perlindungan dan penyantunan dengan susunan.

Fungsi Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma (PSPAD) adalah penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial anak, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial anak, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial anak.

Daya tampung 80 anak dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- Kepala UPTD, dengan dibantu:
- Bagian Tata Usaha;
- Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
- Seksi Pembinaan dan Advokasi;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

c. UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Samarinda.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang kesejahteraan sosial remaja terlantar.

Fungsi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan remaja terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan remaja terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan remaja terlantar.

Daya tampung sebanyak 65 (enam puluh lima) orang dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut :

- Kepala UPTD, dengan dibantu :
- Bagian Tata Usaha;
- Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
- Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

d. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri (PSTWNP) Samarinda

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

Fungsi Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Nirwana Puri penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

Daya tampung 110 (seratus sepuluh) orang dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut:

- Kepala UPTD, dengan dibantu :
- Bagian Tata Usaha;
- Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
- Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

e. UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia (PSKW) Samarinda.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang kesejahteraan sosial dibidang pemberdayaan perempuan, pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila, korban tindak kekerasan dan korban trafficking.

Fungsi Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Harapan Mulia penyusunan rencana teknis operasional pemberdayaan perempuan, pelayanan dan rehabilitasi tuna susila, korban tindak kekerasan dan korban trafficking. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan perempuan, pelayanan dan rehabilitasi tuna susila, korban tindak kekerasan dan korban trafficking.

Daya tampung 35 (tiga puluh lima) orang dengan susunan. Struktur Organisasi sebagai berikut :

- Kepala UPTD, dengan dibantu
- Bagian Tata Usaha;
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sosial;
- Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Sosial**;**
- Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur (SDA) merupakan salah satu unsur yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD. Sampai dengan 31 Desember 2022 jumlah Sumber Daya Manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebanyak 161 orang dan Non ASN sebanyak 193 Orang. Berdasarkan kualifikasi dapat dijelaskan sebagai tabel berikut :

Tabel 1. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Wanita	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas		1	1				1					
Sekretaris	1		1				1					
Kepala Bidang dan Kepala Panti	5	4	9				7	2				
Kepala Seksi	13	4		17			2	15				
Fungsional / Staff PNS	91	42	5	55	61	12	3	37	10	72	7	4
Non ASN	119	74					1	83	10	91	3	5
Jumlah PNS	110	51	16	72	61	12	14	54	10	72	7	4
Jumlah PNS + Non ASN	229	125	16	72	61	12	15	137	20	163	10	9
JUMLAH KESELURUAHAN	**354**		**161**				**354**					

E. Aspek Strategis Organisasi

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di tujukan untuk mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dengan menunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai sosial budaya setempat. Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi Permasalahan-Permasalahan Sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat. Sedangkan unsur pelaksana pemerintah di bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi.

F. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Isu Strategis).

1. Pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial masih dibayangi oleh kecenderungan semakin meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat akan berakibat pada terjadinya Kesenjangan Sosial yang semakin meluas yang berimplikasi pada lemahnya Ketahanan Sosial serta dapat menimbulkan Konflik Sosial ditengah-tengah masyarakat. Isu strategis dalam penanganan Penanyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengacu pada prioritas pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yaitu berfokus pada :
    a. Rencana perpindahan Ibukota Negara menuju Kalimantan Timur akan berdampak bagi pertambahan penduduk sehingga akan memunculkan permasalahan baru yaitu bertambahnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
    b. Belum maksimalnya penggunaan data DTKS untuk penanganan PMKS di Kab/Kota sehingga menjadi penghambat dalam penyusunan program dan distribusi kegiatan untuk Kab/Kota yang dikarenakan terdapat Blank Spot di beberapa Kabupaten yang ada di Kalimantan Timur, hal ini menyebabkan keterlambatan dalam verifikasi dan validasi data pada daerah yang bersangkutan.
    c. Meningkatnya bencana alam maupun sosial dalam beberapa tahun terakhir berpotensi menyebabkan munculnya PMKS baru.

2. Potensi Permasalahan Sosial Sosial Terkait Penetapan Ibukota Negara (IKN) Republik Indonesia

    Permasalahan kesejahteraan sosial cenderung berubah dan berkembang semakin kompleks, Pembangunan Kesejahteraan sosial mempunyai tugas untuk mampu meredam menanggulangi dan mengendalikan permasalahan kesejahteran sosial terebut melalui program-program kesejahteraan sosial yang harus dilaksanakan melalui pelayanan yang berkualitas, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial masih dibayangi oleh kecenderungan semakin meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Disadari bahwa kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat maka akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas yang berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat.

Terkait perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terjadi urbanisasi pada pekerja migran baik yang memiliki kealialian maupun yang tidak memiliki keahlian sehingga potensi pekerja migran terlantar akan meningkat dan masalah sosial lainnya (gelandang, pengemis dll)

G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Adapun sarana dan prasarana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Prov. Kaltim

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	**2**	**3**	**4**
1	Tanah	3.426	m2
2	Gedung	3	Unit (3 Lantai)
		1.335	m2
3	Listrik	3	Jaringan
4	Air	2	Jaringan
5	Telepon	3	Line (1 Fax)
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	3	Ruang
8	Ruang Arsip	1	Ruang
9	Koperasi	-	Buah
10	Taman Dalam	-	Area

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Hakikat Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah upaya peningkatan kualitas Kesejahteraan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelompok dan Komunitas Masyarakat yang memiliki harkat dan martabat, dimana setiap orang mampu mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Hal ini dijadikan sebagai landasan untuk berfikir, berpijak dan bertindak dalam penyusunan Visi, Misi dan Strategi serta sebagai petunjuk pokok pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial daerah Kalimantan Timur.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan secara terencana, terpadu, selaras, bertahap, berkelanjutan dan merata serta dapat dirasakan oleh seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial masyarakat pada umumnya dalam wujud perbaikan kualitas kahidupan yang berkeadilan Sosial.

1. VISI

Upaya mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diharapkan, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur terus menerus mengembangkan inovasi baru dalam merebut peluang yang ada. Selalu berada didepan mengikuti perkembangan masalah Kesejahteraan Sosial yang dewasa ini semakin pesat. Kuatnya persaingan, tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempersiapkan diri untuk tetap eksis dan unggul untuk senantiasa ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan oleh masyarakat (Stakeholder).

Atas dasar itulah, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Visi yang merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana organisasi Dinas Sosial akan diarahkan dan berkarya, sehingga tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi Pemerintah. Rumusan Visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah :

”TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL”

Nilai-nilai inti yang terkandung dalam pernyataan Visi tersebut adalah:

Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial artinya kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan Sosial warga negara terutama Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi Sosialnya.

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh organisasi Pemerintah sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan Misi diharapkan seluruh aparat dan masyarakat dapat mengenal Instansi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan ikut berperan dalam program-programnya sehingga diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. Meningkatkan keberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan.

Misi tersebut mengandung makna bahwa untuk mencapai ”Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” diperlukan : peningkatan perlindungan dan jaminan Sosial, peningkatan pemberdayaan PMKS, meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan.

3. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu ke depan (Kapan)

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

Menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Kalimantan Timur

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara merata dan nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik instansi Pemerintah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data daerah dalam kegiatan organisasi/Pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode I (satu) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kalimantan Timur;

5. Indikator Kinerja Sasaran

Penetapan indikator kinerja sasaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023.

Pencapaian indikator kinerja sasaran ditunjukkan dengan pencapaian *outcome* program Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada priode Rencana Strategis dapat dicapai.

6. Target Tahunan

Dalam melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur Dinas Sosial Provinsi menetapkan target tahunan dan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. Target Tahunan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2018	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Meningkatkan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosen	6,60	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

Adapun untuk melihat program / kegiatan untuk mencapai tujuan / sasaran disajikan pada table dibawah ini:

Tabel 4. Program dan Kegiatan

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM DAN KEGIATAN APBD							
1	Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5%	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5%	Prosen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
					Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
							Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Penyediaan Makanan
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
							Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
							Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
						Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
						Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Permakanan
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
							Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
							Pemulangan ke Daerah Asal

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan
							Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
							Pelayanan Dukungan PsikoSosial
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan indikator kinerja utama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023.

Pencapaian indikator kinerja utama ditunjukkan dengan pencapaian *outcome* program Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada priode Rencana Strategis dapat dicapai. Adapun indikator kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Penetapan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Pehitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Menurunnya jumlah Penyndang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5% pertahun	Mengukur terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya melalui upaya-upaya Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial.	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang ditangani}}{\text{Jumlah Populasi PMKS}}$ X 100 %	Laporan Instansi Sosial Kab/Kota, SKPD Bidang Kesejahteraan Sosial, Laporan UPTD dan laporan kinerja bidang teknis serta Badan Pusat Statistik (BPS), serta sumber lain yang valid.	Dinas Sosial dengan melibatkan Instansi Terkait .

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja tahun 2022 dilakukan berdasarkan ketersediaan anggaran yang dilakukan oleh TAPD yang kemudian dilakukan penyesuaian target yang terdapat dalam Renstra dan RPJMD 2019 – 2023, untuk tahun 2022 telah ditetapkan penetapan kinerja sebagaimana ikhtisar di bawah ini:

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menurunnya jumlah Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5 % pertahun	Prosen	1.5

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi dan Implementasi Sistem LkjIP Tahun 2021.

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, 2020 dan 2021.

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

   Adapun nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan Kinerja	30%	23,05	24,07	24,29
2	Pengukuran Kinerja	25%	17,82	18,75	19,06
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,97	10,97	10,97
4	Evaluasi Kinerja	10%	5,49	5,70	5,70
5	Capaian Kinerja	20%	11,44	11,50	13,13
	Nilai Hasil Evaluasi		**68,77**	**70,99**	**73,15**
	Kategori Penilaian		**B**	**BB**	**BB**

2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya dari hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan penetapan Kinerja Tahun 2022, yang merupakan Implementasi Rencana Strategis 2019 - 2023. Sedangkan capaian kinerja (*performance results*) selama Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Prov. Kaltim Tahun 2022 Per Triwulan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5% pertahun	Prosen	1.5	Triwulan I	0	0	-
					Triwulan II	0.75	0.75	100
					Triwulan III	0.75	0.94	125
					Triwulan IV	0	0	100

C. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022:

Tabel 9. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5% pertahun	Prosen	1.5	1.69	112

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

Tabel 10. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan / Penurunan
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7 = (6-5) / 4*100%
1	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5% pertahun	Prosen	1.23	1.47	1.08	31.7%

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 ini dengan capain kinerja beberapa tahun sebelumnya mengalami penurunan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja.

Adapun Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 11. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Prov Kaltim sampai Tahun 2022 dengan Renstra.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5% pertahun	Prosen	7.5	1.69	5.47

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.

Capaian kinerja pada tahun ini melebihi dengan target awal RPJMD yaitu 1.5% hal ini di sebabkan oleh adanya pemberian bantuan kepada korban bencana melebihi dari target awal yang di karenakan banyaknya bencana yang terjadi pada Tahun 2022.

Disamping itu fokus utama dana ABPD sesuai dengan SPM Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah meningkatkan penanganan dan pelayanan Sosial pemerintah provinsi Kalimantan Timur didukung oleh 5 UPTD yang berfungsi sebagai unit-unit pelayanan Sosial penanganan PMKS dalam panti diantaranya UPTD Panti Sosial Tresna Wherda Nirwana Puri (110 orang), UPTD Panti Sosial Bina Remaja (75 orang) yang berfungsi melaksanakan pelayanan dan bimbingan keterampilan bagi remaja dan putus sekolah, UPTD Panti Sosial Anak Harapan (80 anak) dan UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma (80 anak) berfungsi melaksanakan pelayanan bagi anak yatim piatu, anak terlantar anak yang berhadapan dengan masalah hukum dan yang terakhir yaitu UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia (35 klien) berfungsi melaksanakan pelayanan bagi wanita rawan Sosial ekonomi dan wanita korban *human trafficing*.

5. Analisis Program / Kegiatan.

Untuk mencapai Pengukuran Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dilakukan terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi ‘core’ penanganan bidang Kesejahteraan Sosial tahun 2022 meliputi:

a. Pemberian bantuan Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial sebesar 2.500 Orang. Pada tahun 2022 direncanakan sebanyak 1.518 Orang dan terealisasi sebanyak 2.500 orang dengan tingkat capaian kinerja yaitu 164%.
b. Pemberian bantuan Bagi Anak Terlantar sebesar 200 Orang. Pada tahun 2022 direncanakan sebanyak 200 Orang dan terealisasi sebanyak 200 orang dengan tingkat capaian kinerja yaitu 100%.
c. Pemberian bantuan Lanjut Usia melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar 270 Orang. Pada tahun 2022 direncanakan sebanyak 270 Orang dan terealisasi sebanyak 270 orang dengan tingkat capaian kinerja yaitu 100%.
d. Pemberian bantuan Bagi Penyandang Disabilitas sebesar 300 Orang. Pada tahun 2022 direncanakan sebanyak 300 Orang dan terealisasi sebanyak 300 orang dengan tingkat capaian kinerja yaitu 100%.
e. Pemberian bantuan UEP Bagi Eks Narapidana, Napza sebesar 38 Orang. Pada tahun 2022 direncanakan sebanyak 38 Orang dan terealisasi sebanyak 38 orang dengan tingkat capaian kinerja yaitu 100%.
f. Pemberian bantuan terhadap PMKS melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dapat mandiri sejumlah 20 Kelompok Keluarga Usaha Bersama yang terdiri dari 10 Kepala Keluarga per 1 KUBE, pada tahun 2022 baik keluarga miskin perkotaan, keluarga miskin perdesaan atau keluarga miskin daerah terpencil dan pulau terluar direncanakan sebanyak 20 KUBE (400 Orang) dan terealisasi sebanyak 20 KUBE (400 Orang) atau dengan tingkat capaian 100%
g. Pemberian bantuan UEP Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sebesar 40 Orang. Pada tahun 2022 direncanakan sebanyak 40 Orang dan terealisasi sebanyak 40 orang dengan tingkat capaian kinerja yaitu 100%.

Berdasarkan penanganan tersebut, disamping Program dan Kegiatan lain yang tidak berdampak langsung terhadap PMKS, maka dapat disimpulkan dengan mengacu pada formula dalam pengukuran capaian kinerja jumlah PMKS yang tertangani yaitu sebanyak 4.231 Orang dibagi dengan jumlah populasi PMKS Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 249.892 Jiwa. Adapun terdapat capaian kinerja tahun 2022 adalah 1.69%

- **Permasalahan**

Sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat yang mengalami dan rentan terkena masalah Kesejahteraan Sosial meliputi kemiskinan, keterlantaran, ketunaan Sosial, kecacatan, keterasingan dan keterpencilan serta korban bencana yang secara operasional disebut dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Secara umum kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan Program-Program Kesejahteraan Sosial antara lain meliputi :

1. Perpindahan Ibu Kota Negara menuju Kalimantan Timur akan berdampak yaitu akan menjadi sasaran para pencari kerja dari daerah lain, kedatangan pencari kerja tersebut tidaklah disertai dengan kemampuan dan keterampilan (unskill) yang memadai, sehingga membuat permasalahan baru dengan bertambahnya penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Belum maksimalnya penggunaan data sehingga penanganan PMKS di Kab/Kota sehingga menjadi penghambat dalam penyusunan Program dan distribusi Kegiatan untuk Kabupaten/Kota;
3. Terdapat *Blank Spot* di salah satu Kabupaten yang ada di Kalimantan Timur menyebabkan keterlambatan dalam mengupdate data pada daerah yang bersangkutan;
3. Sinkronisasi Program antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal;
4. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya aparatur dalam proses perencanaan dan mengimplementasikan penanganan Program-Program Kesejahteraan Sosial;

5. Kebijakan pemerintah yang sering mengalami perubahan dari segi peraturan dan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan penganggaran baik di Pusat maupun diDaerah;
6. Rotasi dan mutasi baik ditingkat pejabat maupun ditingkat staf di kab/Kota berlangsung begitu cepat sehingga mempengaruhi profesinalisme penanganan PMKS;
7. Kelembagaan Sosial di Kab/Kota masih bergabung dengan kelembagaan lainnya sehingga penanganan masalah-masalah Kesejahteraan Sosial tidak berjalan secara maksimal;

- **Pemecahan Masalah**

Adapun pemecahan masalah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Meningkatkan sinkronisasi dan sistem pelaporan kinerja Dinas-Dinas / Instansi Sosial Kab/Kota se Kalimantan Timur;
2. Langkah antisipasi dengan pembentukan Panti Sosial Terpadu yang pernah di wacanakan pada Tahun Anggaran 2014 untuk direalisasikan / dilanjutkan kembali;
3. Relokasi Lokal (Fakir Miskin) Pengembangan budidaya Perikanan dilahan Eks Tambang bagi Fakir Miskin;
4. Mengoptimalkan anggaran berdasarkan Program-Program skala prioritas dan mendorong peran serta masyarakat untuk berpatisipasi dalam memberikan pelayanan kepada PMKS serta mendorong peran aktif dunia usaha melalui CSR;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam memantau para pendatang baru dengan memperketat pengawasan disetiap akses pintu masuk di wilayah provinsi Kalimantan Timur;
6. Penajaman Program-Program kesejahetraan Sosial yang berhubungan langsung dengan masyarakat penyandang masalah Kesejahteraan Sosial seperti peningkatan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan pemberian Usaha Ekonomi Produktif;

7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan serta mengikut sertakan pegawai yang ada dilingkup dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur pada setiap Kegiatan pelatihan/diklat baik ditingkat daerah maupun nasional.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100%. Adapun analisis efisiensi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 bisa dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 12. Analisis Efisiensi Sumber Daya Dinas Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5% pertahun	100	92,55	7,45

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah 7,45% yang didapatkan dari perbandingan kembali hasil output dan input hasil capaian kinerja dan penyerapan Anggaran.

D. Realisasi Anggaran

Capain Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari dukungan anggaran yang diterima baik yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Timur.

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 13. Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi APBD	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	1.5	1.69	112	Samarinda, Balipapan, Bontang, Kukar, Kubar, Kutim, Paser, Berau dan Mahulu.	Rp. 77.721.794.050	92,55

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi yaitu 112%.

2. Realisasi anggaran per Program dan Kegiatan

A. Realisasi Anggaran APBD

Secara keseluruhan realisasi anggaran APBD Januari sampai dengan Desember tahun 2022 sebesar Rp. 77.721.749.050 dari total anggaran sebesar Rp. 83.982.567.671 atau sebesar 92,55%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 14. Realisasi Anggaran APBD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		lokasi	Realisasi	%	
1	2	3	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ProvinsiPerkantoran**	**Samarinda**	**57,185,800,018**		
	a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Samarinda*	*727,791,900*		
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	727,791,900	95,84	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		lokasi	Realisasi	%	
	b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Samarinda*	*34,817,804,998*		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	26,692,869,813	90,68	
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	8,124,935,185	97,72	
	c Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Samarinda*	*248,743,700*		
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	248,743,700	90,32	
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	-	-	
	d Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Samarinda*	*8,722,169,722*		
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	151,007,475	99.95	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	5,254,400,903	98.70	
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	307,528,550	99.36	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	3,009,232,794	98.91	
	e Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Samarinda*	*6,392,191,500*		
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	2,433,793,500	88.34	
	- Pengadaan Mebel	Samarinda	3,802,528,000	91.55	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	155,870,000	99.46	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		lokasi	Realisasi	%	
	f Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Samarinda*	1,253,717,222		
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	33,873,400	82.00	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	1,145,249,822	77.32	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	6,080,000	100	
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	68,514,000	99.84	
	g Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Samarinda*	*5,023,380,976*		
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	60,324,500	82.38	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	174,118,776	80.90	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	966,496,600	99.28	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	3,822,441,100	98.24	
2	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Samarinda**	**527,216,480**		
	a Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	*Samarinda*	*527,216,480*		
	- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Samarinda	527,216,480	99.09	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		lokasi	Realisasi	%	
3	**Program Rehabilitasi Sosial**	**10 Kab/Kota**	**13,888,723,801**		
	a Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	*10 Kab/Kota*	*1,581,715,064*		
	- Penyediaan Alat Bantu	10 Kab/Kota	222,520,350	99.70	
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	10 Kab/Kota	387,033,000	99.62	
	- Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10 Kab/Kota	972,161,714	89.12	
	b Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	*10 Kab/Kota*	*7,866,271,552*		
	- Penyediaan Makanan	10 Kab/Kota	5,832,932,767	91.16	
	- Penyediaan Sandang	10 Kab/Kota	818,938,750	99.68	
	- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	10 Kab/Kota	211,854,335	99.84	
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	10 Kab/Kota	609,626,900	98.44	
	- Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	10 Kab/Kota	158,119,600	99.99	
	- Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10 Kab/Kota	143,289,200	99.51	
	- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10 Kab/Kota	91,510,000	99.90	
	c Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	*10 Kab/Kota*	*3,893,776,335*		
	- Penyediaan Permakanan	10 Kab/Kota	2,952,059,556	72.33	
	- Penyediaan Sandang	10 Kab/Kota	38,090,000	99.30	
	- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	10 Kab/Kota	96,368,579	96.23	
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	10 Kab/Kota	198,504,100	93.81	
	- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	10 Kab/Kota	549,254,100	99.70	
	- Pemulasaraan	10 Kab/Kota	59,500,000	83.51	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		lokasi	Realisasi	%	
	d Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	*10 Kab/Kota*	*546,960,850*		
	- Penyediaan Permakanan	10 Kab/Kota	70,000,000	100	
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	10 Kab/Kota	436,474,850	98.73	
	- Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10 Kab/Kota	10,486,000	100	
	- Pemulangan ke Daerah Asal	10 Kab/Kota	30,000,000	100	
4	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	**10 Kab/Kota**	**2,137,261,105**		
	a Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	*10 Kab/Kota*	*2,137,261,105*		
	- Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Kab/Kota	2,137,261,105	98,12	
5	**Program Penanganan Bencana**	**10 Kab/Kota**	**3,062,144,536**		
	a Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	*10 Kab/Kota*	*3,062,144,536*		
	- Penyediaan Permakanan	10 Kab/Kota	1,552,161,732	97.49	
	- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	10 Kab/Kota	153,735,500	89.36	
	- Pelayanan Dukungan PsikoSosial	10 Kab/Kota	1,356,247,304	97.67	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		lokasi	Realisasi	%	
6	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Samarinda**	**920,648,110**		
	a Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	*Samarinda*	*920,648,110*		
	- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Samarinda	920,648,110	98,24	
Total			**77,721,794,050**	**92,55**	

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan capaian Anggaran APBD Tahun 2022 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp. 77,721,794,050 (92,55%)

B. Perkembangan jumlah anggaran

Capaian kinerja Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh besaran jumlah Anggaran yang diterima setiap Tahunnya. Untuk mengetahui perkembangan jumlah anggaran Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur dari tahun 2018 – 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 1. Perkembangan dan Jumlah Anggaran APBD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur periode 2018 – 2021.

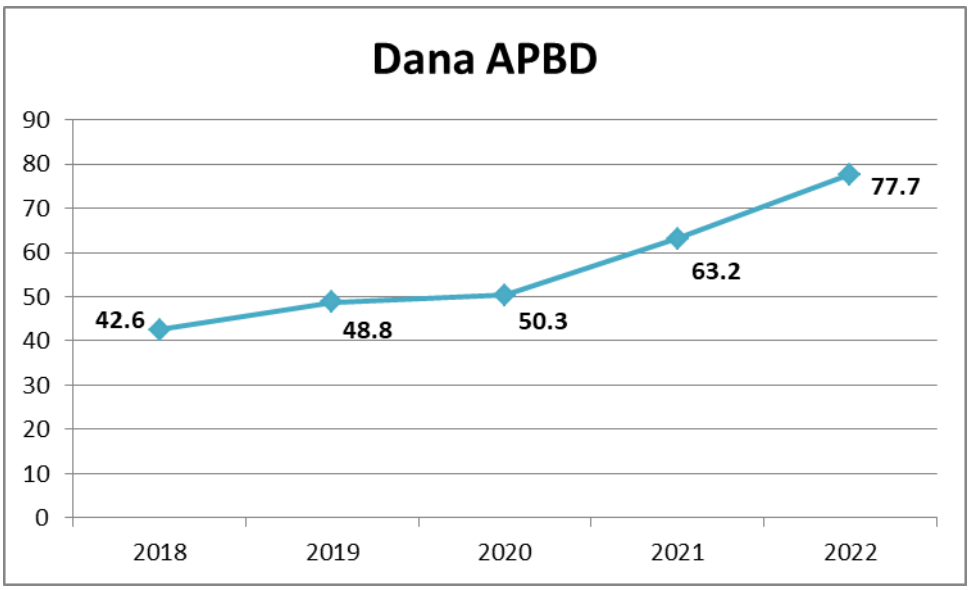

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penanganan Permasalah Sosial tidak dapat diselesaikan tanpa adanya proses Perencanaan yang tidak terpadu untuk menghasilkan Program dan Kegiatan guna pencapaian tujuan Penanganan PMKS. Kegiatan secara integral baik Program dan Kegiatan yang bersumber baik melalui APBD untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai bagian penutup dari LkjIP Tahun 2022 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah di tetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2019-2023 telah tercapai, hal ini ditandai dengan beberapa sasaran yang telah ditetapkan menunjukkan angka pencapaian yang sangat signifikan.

Demikan pula dengan Capaian Kinerja pada Tahun 2022 juga menujukan tingkat keberhasilan disebabkan oleh tercapainya seluruh Kegiatan yang bersifat Operasional. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa seluruh capaian kinerja tersebut diatas, baik yang berhasil maupun yang belum berhasil, telah memberikan pelajaran, berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja mendatang agar lebih efisien dan efektif dalam memanfaatkan seluruh potensi yang ada di lingkup Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur baik dari segi Sumber Daya Manusia / Aparatur maupun Dana Anggaran yang ada untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. SARAN

Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LkjIP) ini di harapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan seluruh *Stakeholder*, sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kami Pimpinan beserta segenap aparatur dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan agar LkjIP Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas kami kepada para *stakeholder* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ini dibuat sebagai bentuk transparasi dan pertanggung jawaban kami terhadap masyarakat.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Aamiin.

Kepala,

Dra. Hj. Norhayati US, M.Si.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19660531 198609 2 001